



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 241/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI, KONSULTASI DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah perlu melakukan Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU** : Tim Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. memberikan arahan dan/atau masukan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota;
 - b. mengoreksi dan memberikan masukan terhadap materi muatan dokumen sesuai bidang tugas; dan/atau
 - c. mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Juni 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 244/KEP/HK/2024

TANGGAL : 27 Jun 2024

TENTANG TIM FASILITASI, KONSULTASI DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI, KONSULTASI DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA		
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Badan Perecanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
4	Kepala Bidang PPEPD pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
B.	TIM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTT		
1	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3	Kepala Bidang Inovasi dan Kelitbangan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait Inovasi dan Kelitbangan.
4	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Infrastruktur dan Kewilayahan.
5	Yoseph H.Dahat, S.IP, M.Ec.Dev/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Perekonomian.
6	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7	Terezinha de Carvalho, SP/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pertanian dan Peternakan.
8	Caroline M.C. Wairo, ST, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan kebencanaan.
9	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida h Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Infrastruktur.
10	Gabriel Adu, S.Si,M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pengembangan Wilayah.
11	Theresia M. Sri S. Lendes, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
12	Mariano Sabinus Tefa, S.STP, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan indikator utama pembangunan Daerah.
13	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait pembangunan Manusia.

14	Vince Bimas Panggula, SKM/Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Stunting.
15	Melianus Mesakh Taebenu, S.STP.MPP/Fungsional Peneliti pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
16	Herson Yusuf,SP/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Inovasi dan Indeks Keuangan Daerah.
C.	TIM PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTT		
1	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoreksi dasar hukum dokumen Perencanaan kab/kota se NTT dan Draft Produk Hukum Daerah tentang Perencanaan kab/kota se NTT.
2	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoreksi dasar hukum dokumen Perencanaan kab/kota se NTT dan Draft Produk Hukum Daerah tentang Perencanaan kab/kota se NTT.
3	Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoreksi dasar hukum dokumen Perencanaan kab/kota se NTT dan Draft Produk Hukum Daerah tentang Perencanaan kab/kota se NTT.
4	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Parekraf Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pariwisata dan Ekonomi kreatif.
5	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pengarusutamaan gender.
6	Lambertus Dope, S.Kom/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

7	Marthen Ly, SE/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait Reviu pengawasan Internal Reviw (APIP).
8	Katarina Mau, SP/ Fungsional Perencana Madya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pertanian Tanang Pangan.
9	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Peternakan.
10	Gabariel Janu, ST/ Perencana Ahli Muda pada DPMTSP Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Penanaman Modal dan Investasi.
11	Apt. Oce Yuliana Naomi Boymau, S.F,MScPH/ Perencana Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.
12	Paul J. Andjelicus, ST,MT/ Perencana Madya Bidang Spasial pada Dinas Parefkras Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Spasial/Keuangan kab/kota.
13	Ivone Lutu Edo, SST,M.Si/ Analisis Perencana Ahli Muda pada BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Anggelina Imaculatta Diwi, ST/ Analisis rencana program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Perindustrian dan Perdagangan.
15	Usman Husin, SE/ Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terkait urusan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI).

D.	TIM PIC KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
D.1	TIM PIC KOTA KUPANG DAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR		
1	Freskiren Mone, S.STP, MM/ Analis Layanan Umum pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur.
2	Anton Laure A.Md.T/ Staf IT pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Ferdinandus Joane Weo/ Pengadministrasi Umum pada Bapperida Provinsi NTT		
D.2	TIM PIC KABUPATEN MANGGARAI DAN KABUPATEN ROTE NDAO		
1	Solaiman Mario, SE, MM /Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Rote Ndao.
2	Mariana Erlando Onjur, SE/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Hendrikus Tobi Sogen,S.Sos/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		

D.3	TIM PIC KABUPATEN ALOR DAN KABUPATEN FLORES TIMUR		
1	Erni Amelia Toelle, SH/ Fungsional umum pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur.
2	Lasarus Afri, S.Km/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Imakulata Kertay, S.Ap/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
D.4	TIM PIC KABUPATEN NAGEKEO DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN		
1	Anna Maria Kerans, ST, MT/ Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2	Yohanes Tanu/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Rey Litelnoni, S.Kom/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
D.5	TIM PIC KABUPATEN ENDE DAN KABUPATEN SUMBA TENGAH		
1	Frits Isak Lake, S.Sos/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Ende dan Kabupaten Sumba Tengah.
2	Marsalende Yulianty Manafe, SH/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Johanis Edison Nguru/ Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT		

D.6	TIM PIC KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN KABUPATEN SABU RAIJUA		
1	Januar Iverson Fointuna, S,STP, M.Dev / Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sabu Raijua.
2	Exal Pelopolin, S.Tr.IP/Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Sefrit Tunis,SH/ Analis Penegakan Integritas dan displin Sumberdaya Manusia Aparatur pada Bapperida Provinsi NTT		
D.7	TIM PIC KABUPATEN LEMBATA DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA		
1	Selfina Naibobe, ST,MUP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Lembata dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2	Rionald H. Pandie, S.Sos/ Fungsional umum pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Bambang Kristianto, S.Kom/ Analis Laporan Keuangan pada Bapperida Provinsi NTT		
D.8	TIM PIC KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DAN KABUPATEN NGADA		
1	Maria Yosephine M. Djawa,SE/ Analis Perencana pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Ngada.
2	Primus Agung Kahan, S.Tr.IP/ Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Bapperida Provinsi NTT		

D.9	TIM PIC KABUPATEN SUMBA BARAT DAN KABUPATEN MALAKA		
1	Yarlin Lenggu, SE/ Fungsional Perencana Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Malaka.
2	Jholinto Tipnoni, S.Pd/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Kepala Sub bagian Keuangan pada Bapperida Provinsi NTT		
D.10	TIM PIC KABUPATEN KUPANG DAN KABUPATEN SIKKA		
1	Igniosensia Naitili, S.Kom/ Fungsional Pranata Komputer pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka.
2	Febryanto Ale Nau/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Shantia Dewi M.A.Mae,A.Md/ Pengelola Keuangan pada Bapperida Provinsi NTT		

D.11 TIM PIC KABUPATEN SUMBA TIMUR DAN KABUPATEN BELU			
1	Johannes M. Subani/ Fungsional Umum pada Bapperida Provinsi NTT	PIC	Mengurus Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta membuat catatan Hasil Fasilitasi, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Belu.
2	Rinaldy Y.Y Pelang/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT		
3	Sebastianus Leu, S.Sos/ Bendahara Pengeluaran APBD pada Bapperida Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h